



## WAKIL GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

---

SAMBUTAN  
P A D A  
ACARA LOKAKARYA “KEMAJUAN DAN TANTANGAN  
PEMERINTAHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2006”  
RABU, 19 NOVEMBER 2008

“BI SMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

HAMDAN WA SYUKRAN LILLAH, SALATAN WASALAMAN ‘ALA RASULILLAH, WA ‘ALA ALIHI WASHAHBIHI WAMAUWALAH.RADHITU BILLAHIRABBA WABIL ISLAMIDINA WABI MUHAMMADIN NABI AW WARRASULA.

YANG SAYA HORMATI (MENYESUAIKAN);

- ✚ SAUDARA SEKDA DAN JAJARANNYA,
- ✚ PROF.DR. FACHRI ALI ,
- ✚ KASUBDIT OTONOMI KHUSUS DEPARTEMEN DALAM NEGERI , BAPAK DODI RIYADMADI ,
- ✚ BAPAK-BAPAK NARASUMBER DARI BERBAGAI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH,
- ✚ PARA KEPALA DINAS/BADAN DAN LEMBAGA PROVINSI NAD,
- ✚ PARA PESERTA LOKAKARYA,
- ✚ PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG DIMULIAKAN ALLAH.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT, KARENA ATAS BERKAH DAN RAHMAT-NYA, KITA SEMUA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK HADIR DI TEMPAT INI DALAM RANGKA MENGIKUTI LOKAKARYA YANG MENGAMBIL TEMA “KEMAJUAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006”.

SELAWAT BERIRING SALAM KITA CURAHKAN KE PANGKUAN RASULULLAH SAW YANG TELAH MENGAJARKAN UMATNYA UNTUK SELALU MENCIPTAKAN DAN MEMBANGUN KEDAMAIAN DI MUKA BUMI INI.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MENGAWALI SAMBUTAN INI IZINKANLAH SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG DI BANDA ACEH KEPADA BAPAK-BAPAK PARA NARASUMBER DAN PESERTA DARI JAKARTA, BAIK DARI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI MAUPUN DARI BERBAGAI UNIVERSITAS TERKEMUKA.

SELANJUTNYA MARI KITA MERENUNG SEJENAK DALAM SUASANA PENUH BAHAGIA DI BATIN KITA MASING-MASING,

BAHWA HARAPAN MoU HELSINKI UNTUK MELAHIRKAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS KINI TELAH MENJADI MILIK RAKYAT ACEH. MASYARAKAT ACEH BERSAMA PEMERINTAH DAERAH KINI TELAH MENDAPATKAN SEBUAH KEHORMATAN BARU DENGAN DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TERSEBUT.

MENGAPA KITA BEGITU TERHORMAT, JAWABANNYA ADALAH PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT ACEH KINI TELAH MENDAPATKAN SEBUAH KEWENANGAN BARU YANG LUMAYAN BESAR DALAM MENGATUR OTONOMINYA SENDIRI.

PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PEMERITAHAN ACEH TERSEBUT MERUPAKAN SALAH SATU KOMITMEN PEMERINTAH R.I DALAM MENINDAKLANJUTI NOTA KESEPAKATAN DAMAI ANTARA PEMERINTAH RI DAN GAM.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAI SUATU KILAS BALIK, BAHWA PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH (UUPA), TENTU TIDAK TELEPAS KAITANNYA DENGAN NOTA KESEPAKATAN DAMAI ANTARA PEMERINTAH R.I DAN GAM YANG DITANDA TANGANI OLEH KEDUA BELAH PIHAK DI HELSINKI PADA TANGGAL 15 AGUSTUS 2005. DALAM KESEPAKATAN ITU KEDUA BELAH PIHAK MENYETUJUI

BAHWA ACEH AKAN DIBERIKAN KEWENANGAN TERSENDIRI UNTUK MENGATUR SISTEM PEMERINTAHANNYA, YANG TENTU SAJA TIDAK TERLEPAS DARI RANGKAIAN HUKUM TATA NEGARA YANG BERLAKU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

BERDASARKAN PERSETUJUAN TERSEBUT, MAKA MASYARAKAT ACEH BESERTA SELURUH KOMPONENNYA MENYUSUN SUATU RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH, ATAU YANG LEBIH DIKENAL DENGAN RUU-PA, DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DAN DPR-RI DALAM MEMBERI PERCEPATAN PEMBAHASAN RUU-PA DIMAKSUD. SELAIN ITU JUGA DIMAKSUDKAN AGAR DAPAT MENJARING ASPIRASI YANG BERKEMBANG DARI SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT ACEH.

UPAYA MELAHIRKAN RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN ACEH INI, HARUS DIAKUI MEMANG TIDAKLAH MUDAH, PROSESNYA SANGAT BERLIKU, KARENA SELAIN HARUS MENJARING SEMUA ASPIRASI YANG BERKEMBANG DARI SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT ACEH, JUGA HARUS MENGAKOMODASIKAN NILAI-NILAI HUKUM YANG BERLAKU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA DALAM PROSES PENYUSUNAN RUU-PA DAN PEMBAHASAN DI TINGKAT DAERAH, TIDAK ADA YANG BERTENTANGAN DENGAN KETATANEGARAAN YANG BERLAKU DALAM PAYUNG HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

UNTUK MENGAKOMODASIKAN SEMUA ITU AMATLAH BERAT, HAL INI DAPAT DIRASAKAN PADA SAAT-SAAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU-PA) MULAI DI TINGKAT DAERAH HINGGA DI TINGKAT PUSAT DI JAKARTA. NAMUN KITA BERSYUKUR, ATAS PERAN SERTA DAN USAHA-USAHA DAN DEDIKASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH SEMUA PIHAK, MULAI DARI PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD PROVINSI NAD, PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA, MAHASISWA, TIM ADVOKASI DAN TIM PENGAWALAN, TNI/POLRI, GAM DAN BAHKAN HAMPIR SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT, TERLEBIH LAGI SECARA KHUSUS USAHA-USAHA KERAS YANG DILAKUKAN OLEH PANSUS, PANJA DAN TIM PERUMUS DPR-RI BERSAMA PEMERINTAH PUSAT, YANG AKHIRNYA PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2006 YANG LALU TELAH DISAHKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

PARA HADI RIN DAN UNDANGAN YANG SAYA HORMATI ,

HARI INI LEBIH KURANG DUA TAHUN SUDAH KITA TERAPKAN, KIRANYA PERLU MELIHAT SEJENAK SEJAUH MANA KEMAJUAN YANG TELAH DICAPAI DAN TANTANGAN APA YANG DIHADAPI. KITA SANGAT MERASA PERLU UNTUK MENGETAHUI SECARA DETAIL PERKEMBANGANNYA, BAIK ITU TERKAIT DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MENJABARKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP) DAN PERATURAN PRESIDEN (PERPRES),

MAUPUN KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DAN DPR ACEH DALAM MENYUSUN QANUN-QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAANNYA.

DEMIKIAN PULA UNTUK MENGIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INI YANG MENJADI KEWAJIBAN DAERAH, KAMI BERSAMA LEGISLATIF ACEH SECARA MARATON MEMBAHAS SEJUMLAH QANUN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAANNYA, SEHINGGA PELAKSANAAN LOKAKARYA INI KAMI PANDANG SANGAT TEPAT, MANAKALA KAMI INGIN MENGETAHUI SEJAUHMANA KEMAJUAN DAN APA PULA TANTANGANNYA.

HARI RIN SEKALIAN,

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, KITA BERHARAP LOKAKARYA INI DAPAT MEMPERJELAS, APAKAH PENERAPAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH BENAR-BENAR SUDAH SESUAI DENGAN KEKHUSUSAN, ATAU SAMA SAJA DENGAN OTONOMI DAERAH BAGI PROVINSI LAINNYA DI INDONESIA. KITA BERHARAP PULA PERSEPSI KITA TENTANG KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN DI ACEH DAPAT DIPAHAMI SECARA BENAR OLEH SELURUH KOMPONEN BANGSA, SEBAB UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH ADALAH PRODUK PEMERINTAH INDONESIA YANG DITERAPKAN DI ACEH SECARA SPESIFIK.

SEMOGA APA YANG KITA BAHAS DALAM LOKAKARYA INI DAPAT  
MEMBAWA MANFAAT YANG SEBESAR-BESARNYA BAGI SELURUH  
RAKYAT. AMIN YA RABBAL ALAMIN, TERIMAKASIH.

**Wabillahitaufig walhidayah  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh**

WAKIL GUBERNUR ACEH

MUHAMMAD NAZAR